

TELAAH EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN MELALUI WARUNG DESA : STUDI KASUS PADA PILOT PROYEK WARUNG DESA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008¹

M. Parulian Hutagaol, Sri Hartoyo dan Alla Asmara

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

ABSTRACTS

Raskin program is the government's attempt to relax economic burden which poor families face by giving them a certain amount of subsidized-price rice (raskin). In effort to improve the program's performance, recently the government introduced new concept for the distribution of raskin. By this new concept, the distribution of raskin would be through rural kiosks, not through village-level government network as used to be. Before institutionalized as an alternative for the conventional one, the new concept was tested in some pilot projects located in several provinces, including in West Java Province. Based on the field work in this province, this study concluded that the new concept could improve the program's performances, especially with regard to quantity and price correctness. It was also found that villagers and local government apparatuses were in support for its implementation. However, it is necessary for the government to monitor and evaluate its implementation on a regular base and to develop a system of governance at village level to assure its good performance. It is also necessary to give a more attractive amount of *fee* for the owners of kiosk to ensure their commitment to support the program.

Keywords : *raskin program, subsidized-price rice (raskin), rural kiosk, target household, distribution point*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Sejak tahun 1998 pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan suatu kebijakan yang memihak kaum miskin (*pro-poor policy*) yang kemudian dikenal secara luas sebagai Program Raskin². Secara khusus, Program Raskin ditujukan untuk membantu Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam memenuhi kebutuhan pangannya, khususnya beras, dengan menyediakan sejumlah tertentu beras yang harga pembelannya disubsidi oleh pemerintah kepada setiap RTS.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penerima utama alokasi Raskin nasional, meskipun sesungguhnya provinsi ini adalah produsen utama beras nasional. Kecenderungan alokasi Raskin untuk Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir ini (2002-2008) dapat dilihat pada Tabel 1. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada penurunan yang sistematis dalam volume raskin yang dialokasikan untuk para RTS di provinsi ini selama periode 2002-2008. Bahkan, data pada Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa meskipun, sejak 2006, pemerintah telah mengurangi kuota Raskin per RTS menjadi lebih kecil dari kuota sebelumnya yang besarnya adalah 20 kg/RTS/bulan, total volume raskin untuk Provinsi Jawa Barat justru cenderung meningkat setelah tahun 2006.

Hal ini menyiratkan bahwa populasi RTS di provinsi ini justru semakin meningkat beberapa tahun terakhir ini. Fenomena ini tampak secara

¹ Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang disponsori oleh BULOG Sub-Divisi Jawa Barat, dimana laporan lengkapnya telah diserahkan kepada pihak sponsor. Penulis mengucapkan terimakasih pada pihak sponsor atas dukungan dana dan kerjasamanya.

² Program di mulai pada tahun 1998 dengan nama Program Operasi Pasar Khusus (Program OPK). Pada tahun 2002 berubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin, disingkat Program Raskin.

eksplisit dalam data yang tersaji pada Tabel 2 di bawah ini. Fenomena peningkatan angka kemiskinan absolut tersebut bukanlah suatu hal yang eksklusif untuk Provinsi Jawa Barat. Fenomena ini merupakan refleksi kondisi kecenderungan angka kemiskinan absolut secara nasional yang merupakan konsekuensi dari kondisi perekonomian nasional yang belum pulih dari krisis yang dihadapi.

Sementara itu, pada bulan-bulan terakhir tahun 2008, tekanan terhadap perekonomian nasional muncul akibat dari krisis keuangan di Amerika Serikat yang diduga akan menimbulkan peningkatan pengangguran di Indonesia. Peningkatan angka pengangguran tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan jumlah RTS. Hal tersebut bermakna bahwa semakin banyak RTS yang membutuhkan Raskin. Pertanyaannya adalah bagaimana alokasi dana subsidi Raskin yang jumlahnya sudah tertentu mampu mengurangi beban pengeluaran RTS yang jumlahnya semakin meningkat.

Salah satu strategi untuk mensiasati kondisi ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Raskin. Dari studi-studi yang dilaksanakan oleh 10 perguruan tinggi selama tiga tahun (2005-2007) di 10 provinsi yang tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan dan NTB menunjukkan mekanisme distribusi pada level desa/kelurahan merupakan titik yang paling lemah dalam pelaksanaan Program Raskin. Untuk itu perlu dibangun alternatif mekanisme distribusi raskin pada level desa yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin. Mekanisme pendistribusian melalui Warung Desa merupakan alternatif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas pola distribusi melalui warung desa dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap pola tersebut dalam pilot proyek yang dilaksanakan di Jawa Barat.

Tabel 1. Pagu Alokasi Raskin Provinsi Jawa Barat 2002-2008

Uraian	Tahun Anggaran						
	2002 ^{a)}	2003 ^{a)}	2004 ^{a)}	2005 ^{b)}	2006 ^{c)}	2007 ^{d)}	2008 ^{d)}
Volume Raskin (ton)	285 668	291 155	315 702	284 248	268 462	273 701	290 507
Perubahan dari Tahun Sebelumnya	n.a	+ 5 487 (+ 1,9 persen)	+ 24 547 (+ 8,4 persen)	- 20 907 (- 6,6 persen)	- 15 786 (- 5,5 persen)	+ 5 239 (+ 1,2 persen)	+ 16 806 (+ 6,1 persen)

Sumber: a) Tabor, Steven R and Sawit, Husein, 2005.
 b) Tim Raskin Provinsi Jawa Barat, 2005.
 c) Departement Dalam Negeri RI dan Perum Bulog, 2006.
 d) Kadivre Perum Bulog Jawa Barat, 2007.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat, 2002- 2007

Uraian	Tahun dan Jiwa (1000)				
	2002 ^{a)}	2003 ^{a)}	2004 ^{a)}	2005 ^{b)} (Juli)	2007 ^{b)} (Maret)
Total	4 938,20	4 899,00	4 654,20	5 137,5	5 455,2
a. Perkotaan	2 647,05	2 445,30	2 243,20	2 444,4	2 654,5
b. Pedesaan	2 291,16	2 453,70	2 411,00	2 693,1	2 800,7

Sumber: a) BPS Jawa Barat, 2005.
 b) BPS Jawa Barat, 2007.

TUJUAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- (a) Menganalisis keefektifan pelaksanaan distribusi raskin melalui warung desa.
- (b) Menelaah tanggapan *stakeholder* (RTM, pemilik warung desa dan aparat pemerintahan desa/kelurahan) terhadap pola pendistribusian Raskin melalui warung desa.
- (c) Merumuskan saran-saran perbaikan dalam pola pendistribusian Raskin melalui Warung Desa.

METODOLOGI PENELITIAN

1. KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep Dasar Program Raskin

Kebijakan pemberantasan kemiskinan (*pro poor public policy*) dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu (1) kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan (2) kebijakan yang bertujuan menyediakan pelayanan sosial dasar (*basic social services*) kepada masyarakat miskin untuk membantu mengatasi akibat negatif dari kemiskinan yang mereka alami. Program beras untuk keluarga miskin (Program Raskin) adalah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan tipe kedua.

Program Raskin adalah program pemerintah untuk memberikan bantuan beras dengan harga penjualan bersubsidi kepada masyarakat miskin. Melalui program ini pemerintah menyediakan beras kepada masyarakat miskin sebanyak 15 Kg/KK/ bulan. Beras diberikan tidak dengan cuma-cuma. Penerima bantuan Raskin harus membayar

dengan harga Rp 1.600/Kg netto di Titik Distribusi. Sehingga, selisih antara harga pasar yang seharusnya dibayar dengan harga yang sesungguhnya dibayar (Rp 1.600/Kg) oleh keluarga miskin menjadi besaran subsidi yang ditanggung oleh pemerintah per kilogramnya.

Bila kita anggap beras Raskin ini sama kualitasnya dengan beras yang paling murah dijual di pasar, dan harganya di pasar lokal adalah Rp 4.000/Kg, maka untuk setiap Kg, penerima Raskin mendapat subsidi per Kg sebesar Rp 2.400. Bila mengacu pada jumlah normatif yang disalurkan per KK per bulan tersebut di atas, maka setiap bulan satu keluarga miskin akan mendapat subsidi pangan sebesar Rp 36.000. Hal ini dapat dipandang sebagai pendapatan suplementer bagi keluarga miskin.

Ada dua implikasi langsung dari pemberian Raskin ini bagi keluarga miskin yang menerimanya. *Pertama*, dengan mendapatkan jumlah Raskin seperti yang ditetapkan, maka diharapkan keluarga miskin akan dapat mempertahankan asupan kalori dan gizinya. *Kedua*, pendapatan suplementer yang timbul diharapkan dapat digunakan oleh keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan lainnya.

Konsep Dasar Sistem Distribusi Raskin melalui Warung Desa

Perbedaan utama pola distribusi Raskin melalui Warung Desa dengan pola yang selama ini berjalan (Pola Desa) adalah terkait dengan pelaksanaan distribusi di level desa. Pada pola warung desa, beras dari gudang BULOG di kirim ke warung desa yang letaknya tersebar di sekitar tempat tinggal RTS. Dengan demikian pelaksana utama pendistribusian adalah Warung Desa. Adapun aparat desa/kelurahan berperan mengawasi pelaksanaan

pendistribusian. Hal ini sangat berbeda dengan Pola Desa dimana beras dari gudang BULOG di kirim ke titik distribusi, umumnya adalah di kantor desa. Lebih lanjut, beras dari kantor desa dikirim ke tingkat RT/RW oleh Satuan Kerja Raskin (Satker Raskin) tingkat desa. Dengan demikian Satker Raskin menjadi pelaksana utama pendistribusian. Di samping itu, pengiriman beras dari titik distribusi (kantor desa) ke RT/RW menimbulkan biaya tambahan yang dibebankan pada harga tebus Raskin.

Pada pola Warung Desa, RTS dapat menebus Raskin di Warung Desa tanpa perlu dibebankan biaya tambahan karena letak Warung Desa berdekatan dengan tempat tinggal RTS. Dengan demikian, RTS dapat menebus beras Raskin sesuai harga normatifnya yaitu RP 1.600/Kg. Disamping itu, pada pola Warung Desa penebusan beras oleh RTS dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus khawatir jatahnya dialihkan ke pihak lain. Dengan tidak adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada RTS dan penebusan yang bertahap maka pola distribusi melalui Warung Desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Program Raskin, khususnya terkait ketepatan harga.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi penelitian dilakukan secara sengaja. Penelitian dilakukan di dua lokasi, yaitu Kabupaten Sumedang dan Kota Bogor. Pemilihan kedua lokasi tersebut didasarkan

atas pertimbangan bahwa keduanya merupakan lokasi pilot proyek warung desa, yang pemilihannya didasarkan atas angka kemiskinan yang relatif sama dengan tingkat kemiskinan Propinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, pada setiap kabupaten/kota dipilih 2 kecamatan dan 5 desa/kelurahan (Tabel 3). Penentuan kecamatan dan desa dilakukan secara *purposive*, dengan dasar pertimbangan tingkat kemiskinan dan keterjangkauan lokasi. Penelitian lapangan dilakukan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Oktober 2008.

Data dan Sumber Data

Data yang dihimpun dalam kegiatan penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder dihimpun dari berbagai instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan dan Desa/Kelurahan lokasi studi. Adapun pengumpulan data primer dilakukan dengan dua pendekatan yaitu *indepth interview* dan *Focus Group Discussion* (FGD). *Indepth interview* dilakukan terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin dan terhadap Pengelola Warung Desa. Penentuan sampel RTS dilakukan secara acak (*random sampling*). Adapun untuk *indepth interview* terhadap Warung Desa dilakukan terhadap keseluruhan Warung Desa (metode sensus). Untuk jumlah sampel RTS pada setiap desa/kelurahan dan setiap Warung Desa disajikan pada Tabel 3. Sementara itu, untuk menghimpun informasi dan pandangan pengelola Raskin tingkat Desa/Kelurahan maka dilakukan FGD.

Tabel 3. Lokasi Studi dan Distribusi Sampel RTS

Desa/Kelurahan	Total Responden RTS (unit)	Jumlah Wardes (Unit)	Responden RTS per Wardes (Unit)
Kabupaten Sumedang			
Kec. Sumedang Utara			
- Kelurahan Talun	20	3	6 s/d 7
- Desa Mulyasari	20	4	5
- Desa Kebonjati	20	4	5
Kec. Darmaraja			
- Desa Cikeusi	20	2	10
- Desa Sukamenak	20	2	10
Kota Bogor			
Kec. Tanah Sareal			
- Kelurahan Kayu Manis	20	5	4
- Kelurahan Kedung Waringin	20	5	4
- Kelurahan Sukaresmi	20	2	10
Kec. Bogor Selatan			
Rancamaya	20	3	6 s/d 7
Muarasari	20	5	4

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif, baik deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif dan kuantitatif tersebut digunakan untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas pola Warung Desa dan tingkat penerimaan *stakeholder* terhadap pola tersebut. Untuk tingkat efektivitas yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada dua indikator kinerja yaitu: (1) ketepatan jumlah, dan (2) ketepatan harga.

(a) Ketepatan Jumlah

$$J = \frac{Ja}{Js} \times 100 \% \dots\dots\dots (2)$$

dimana:

J = indeks kinerja ketepatan jumlah (persen).

Js = jumlah beras yang seharusnya diterima responden (10 Kg/RTM/bulan).

Ja = jumlah beras yang aktual diterima responden (Kg/RTM/bulan).

(b) Ketepatan Harga

$$H = \frac{Ha}{Hs} \times 100 \% \dots\dots\dots (3)$$

dimana:

H = indeks kinerja ketepatan harga (persen).

Hs = harga beras yang seharusnya dibayar responden (Rp 1000/Kg).

Ha = harga beras yang aktual dibayar responden (Rp/Kg).

METODOLOGI PENELITIAN

1. KEEFEKTIFAN PELAKSANAAN POLA DISTRIBUSI RASKIN MELALUI WARUNG DESA

Menurut Pedoman Umum Raskin Tahun 2008, kuota normatif bagi setiap RTM adalah 15 Kg/KK/bulan dan dengan harga tebus Rp 1.600/Kg. Hasil survey lapangan terkait dengan ketepatan jumlah dan ketepatan harga pada pendistribusian Raskin melalui Warung Desa ditampilkan pada Tabel 4. Berdasarkan tabel

tersebut diketahui bahwa terkait dengan ketepatan jumlah ternyata bahwa pelaksanaan distribusi Raskin melalui Warung Desa di Kota Bogor mampu mencapai kinerja tepat jumlah sebesar 100 persen.

Sementara itu, untuk Kabupaten Sumedang menunjukkan kenyataan bahwa jumlah aktual Raskin yang diterima para keluarga penerima Raskin masih lebih rendah dari kuota normatif. Namun demikian, dibandingkan dengan pola yang selama ini berjalan (Pola Desa) ternyata bahwa

pendistribusian melalui Warung Desa mampu mencapai kinerja ketepatan jumlah yang lebih baik (Tabel 5).

Untuk tingkat ketepatan harga, pola Warung Desa ternyata mampu mencapai tingkat ketepatan 100 persen. Artinya bahwa dengan pola Warung Desa maka RTS menebus Raskin sesuai dengan harga yang telah ditetapkan yaitu Rp 1.600/Kg. Adapun pada Pola Desa, RTS harus menebus Raskin melebihi harga normatifnya yaitu dengan kisaran Rp 1800/kg - Rp 2000/kg.

Tabel 4. Jumlah Beras yang Diterima RTS dan Harga Tebus Raskin Pada Pola Distribusi melalui Warung Desa

Desa/Kelurahan	Jumlah Beras Diterima RTS	Harga Tebus
	(Kg/Bln)	(Rp/Kg)
Kab. Sumedang		
a. Talun	5,00	1600
b. Mulyasari	5,00	1600
c. Kebonjati	7,50	1600
d. Cikeusi	8,50	1600
e. Sukamenak	10,00	1600
Kota Bogor		
a. Kayumanis	15,00	1600
b. Sukaresmi	15,00	1600
c. Kedung Waringin	15,00	1600
d. Muarasari	15,00	1600
e. Rancamaya	15,00	1600

Sumber: data primer, diolah.

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Beras Yang Diterima RTS pada Pola Desa dan Pola Warung Desa di Kabupaten Sumedang, Tahun 2008

Desa/Kelurahan	Jumlah Beras yang Diterima RTS (kg/bln)	
	Pola Desa	Pola Warung Desa
a. Kelurahan Talun	5,00	5,00
b. Desa Mulyasari	3,00	5,00
c. Desa Kebonjati	6,00	7,50
d. Desa Cikeusi	3,00	8,50
e. Desa Sukamenak	10,00	10,00

Sumber: data primer, diolah.

2. TANGGAPAN *STAKEHOLDERS* TERHADAP POLA WARUNG DESA

Tanggapan RTS Terhadap Pola Warung Desa

Berdasarkan konsep dasar sistem distribusi melalui Warung Desa maka tanggapan RTS lebih ditujukan pada dua hal yaitu masalah harga dan jumlah beras yang diterima oleh RTS. Selain itu juga dibahas mengenai kemudahan dalam menebus Raskin.

Berdasarkan Tabel 6 dapat ditunjukkan bahwa dari 100 responden di Kota Bogor, ternyata 95 persen atau lebih menyatakan bahwa dengan pola warung desa ini menyebabkan; Pertama, harga pembelian raskin menjadi lebih murah jika dibandingkan dengan Pola Desa. Hal ini dapat dipahami karena harga pembelian Raskin di Warung Desa telah ditetapkan sebesar Rp 1600,-/Kg dan Warung Desa tidak boleh menaikkan harga jual. Sebagai penyalur Raskin, warung desa juga telah diberi *fee* sebesar Rp 100/Kg. Kedua, jumlah raskin yang menjadi hak RTS lebih banyak dibandingkan dengan pola penyaluran tradisional (melalui desa). Dengan pola Warung Desa, RTS yang berhak menerima Raskin diberi kartu. Rumah tangga yang tidak memperoleh kartu tidak berhak memperoleh Raskin dan tidak boleh membeli Raskin.

Akibatnya RTS yang berhak memperoleh raskin dapat menerima secara penuh kuantitas yang menjadi haknya. Ketiga, responden penerima raskin menyatakan bahwa penyaluran dengan pola warung desa lebih baik dibandingkan pola konvensional. Dengan pola warung desa, jatah raskin tidak harus ditebus sekaligus. Sehingga bagi RTS yang tidak mempunyai uang, pembelian Raskin dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan tidak ada alasan untuk menjual Raskin kepada rumah tangga yang tidak berhak. Keempat, rumah tangga penerima raskin merasa lebih santai, RTS tidak harus terburu-buru membeli Raskin, karena pembelian raskin dapat dilakukan kapan saja.

Tanggapan RTS terhadap pola warung desa di Sumedang nampak sedikit berbeda. Persentase yang setuju bahwa pola warung desa memberikan harga yang lebih murah, jumlah beras yang diperoleh lebih banyak, pelaksanaannya lebih baik dan pembeliannya lebih santai mencapai angka persentase yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan Kota Bogor. Persentase tersebut di Kecamatan Darmaraja berturut-turut adalah 92,5 persen, 85,0 persen, 72,5 persen dan 82,5 persen.

Tabel 6. Tanggapan RTS terhadap Pelaksanaan Penyaluran Raskin Pola Warung Desa, di Jawa Barat, Tahun 2008

Uraian	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Menjawab	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Menjawab
Kota Bogor	Kec. Tanah Sareal			Kec. Bogor Selatan		
Harga lebih murah	98,3	0,0	0,0	95,0	0,0	5,0
Jumlah lebih banyak	98,3	1,7	0,0	97,5	0,0	2,5
Pelaksanaan lebih baik	98,3	1,7	0,0	97,5	0,0	2,5
Pembelian lebih santai	96,7	3,3	0,0	97,5	0,0	2,5
Kabupaten Sumedang	Kec. Darmaraja			Kec. Sumedang Utara		
Harga lebih murah	92,5	7,5	0,0	75,0	15,0	10,0
Jumlah lebih banyak	85,0	15,0	0,0	73,3	15,0	11,7
Pelaksanaan lebih baik	72,5	27,5	0,0	71,7	20,0	8,3
Pembelian lebih santai	82,5	12,5	0,0	65,0	25,0	10,0

Tabel 7. Kesiediaan RTS Dilayani dengan Warung Desa di Jawa Barat, Tahun 2008

Kabupaten-Kota/Kecamatan	Bersedia	Tidak Bersedia
Kota Bogor		
Tanah Sareal	93,3	6,7
Bogor Selatan	95,0	5,0
Kab. Sumedang		
Darmaraja	90,0	10,0
Sumedang Utara	83,7	16,3

Sementara itu di Kec. Sumedang Utara, persentase tanggapan RTS terhadap pelaksanaan warung desa lebih kecil lagi, yaitu berturut-turut adalah 75,0 persen, 73,3 persen, 71,7 persen dan 65,0 persen. Keadaan ini dapat terjadi kemungkinan karena pelaksanaan penyaluran raskin dengan Pola Desa yang selama ini berlangsung relatif lebih baik. Namun demikian berdasarkan penilaian RTS, pelaksanaan penyaluran raskin melalui pola warung desa di Kabupaten Sumedang relatif lebih baik daripada Pola Desa.

Penilaian RTS terhadap penyaluran raskin melalui pola warung desa yang relatif baik menyebabkan kesediaan RTS untuk dilayani dengan pola warung desa. Untuk Kota Bogor, kesediaan RTS dilayani dengan pola warung desa adalah 93,3 persen di Kec. Tanah Sareal dan 95 persen di Kec. Bogor Selatan.

Sementara itu, kesediaan RTS dilayani dengan pola warung desa dalam penyaluran raskin adalah 90,0 persen di Kec. Darmaraja dan 83,7 persen di Kec. Sumedang Utara (Tabel 7).

Tanggapan Pemilik Warung Desa

Kesediaan pemilik warung desa untuk melayani penyaluran Raskin ditunjukkan pada Tabel 8. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa di Kota Bogor, pemilik warung desa yang masih tetap bersedia melayani penyaluran raskin adalah 91,7 persen (Kec. Tanah Sareal) dan 100 persen (Kec. Bogor Selatan). Sementara itu, di Kabupaten Sumedang pemilik warung desa yang masih tetap bersedia melayani penyaluran Raskin adalah 75 persen (Kec. Darmaraja) dan 100 persen (Kec. Sumedang Utara).

Tabel 8. Kesiediaan Pemilik Warung Desa Melayani Penyaluran Raskin di Jawa Barat, Tahun 2008.

Kabupaten-Kota/Kecamatan	Bersedia	Tidak Bersedia
Kota Bogor		
Kec. Tanah Sareal	91,7	8,3
Kec. Bogor Selatan	100,0	0,0
Kabupaten Sumedang		
Kec. Darmaraja	75,0	25,0
Kec. Sumedang Utara	100,0	0,0

Tabel 9. Penilaian Pemilik Warung Desa terhadap *Fee* RP 100/Kg di Jawa Barat, Tahun 2008.

Kabupaten-Kota/Kecamatan	Cukup	Kurang
Kota Bogor		
Kec. Tanah Sareal	8,3	91,7
Kec. Bogor Selatan	12,5	87,5
Kabupaten Sumedang		
Kec. Darmaraja	25,0	75,0
Kec. Sumedang Utara	54,0	45,5

Untuk menyalurkan raskin, warung desa memperoleh *fee* sebesar Rp 100.- per kg beras. Di samping itu juga ada jaminan bahwa beras yang disalurkan warung desa pasti dapat tersalurkan semua. Sehingga dengan *fee* sebesar itu, kemungkinan pemilik warung desa masih memperoleh tambahan keuntungan dari aktivitas penyaluran raskin. Kemungkinan lain adalah pemilik warung desa mempunyai harapan bahwa *fee* penyaluran raskin pada masa yang akan datang akan ditingkatkan.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik warung desa, *fee* penyaluran raskin sebesar Rp 100 per kg beras masih dianggap belum cukup. Hal ini didasarkan bahwa untuk menyalurkan Raskin diperlukan tempat untuk penyimpanan beras yang relatif luas, karena Raskin disalurkan dalam sekali sebulan. Berbeda dengan barang dagangan lainnya tidak memerlukan tempat yang luas, karena pembelian barang dagangan tidak sekaligus untuk waktu sebulan, tetapi dapat dilakukan dalam beberapa kali. Hal ini selain tempat penyimpanan juga karena modal yang mungkin relatif terbatas. Tanggapan pemilik warung desa terhadap besarnya *fee* tersebut disajikan pada Tabel 9.

Di Bogor, pemilik warung desa yang menyatakan bahwa *fee* penyaluran sebesar Rp 100 per Kg masih kurang adalah 91,7 persen di Tanah Sareal dan 87,5 persen di Bogor Selatan. Sementara itu di Sumedang yang menyatakan masih kurang lebih sedikit jika dibandingkan

dengan Bogor, yaitu 75 persen di Darmaraja dan 45,5 persen di Sumedang Utara. Dari uraian ini maka dapat dinyatakan bahwa *fee* penyaluran raskin sebesar Rp 100.- per Kg beras masih dirasakan kurang. Istilah kurang di sini adalah relatif jika dibandingkan dengan keuntungan dari penjualan komoditas lainnya.

Tanggapan Aparat Desa/Kelurahan

Pada saat sosialisasi Pola Warung Desa di tingkat desa/kelurahan, pada umumnya pelaksana Raskin di tingkat desa/kelurahan menunjukkan sifat ketidak-senangan atas pelaksanaan Pola Warung Desa, bahkan ada yang secara terus terang menolak secara tegas dengan alasan bahwa pelaksanaan penyaluran Raskin Pola Desa sudah cukup baik, pola warung desa tidak akan dapat menjangkau masyarakat yang tidak mampu menebus Raskin, seperti orang jompo dan lain sebagainya. Di samping itu, sebetulnya terdapat alasan penolakan yang muncul ke permukaan (tersembunyi), yaitu pelaksana Raskin di desa akan kehilangan pekerjaan dan insentif.

Setelah pola Warung Desa dilaksanakan di desa/kelurahan sampel maka tanggapan Pimpinan desa/kelurahan dan perangkat desa/kelurahan setuju, bila pola wardes dilembagakan sebagai alternatif pola distribusi. Namun dalam pelaksanaannya mereka mengusulkan melibatkan RT/RW, dan pemerintah menyediakan insentif untuk aparat

desa/kelurahan yang terlibat dalam pelaksanaan warung desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari pembahasan terdahulu dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan berikut :

1. Pelaksanaan sistem distribusi Raskin melalui Warung Desa mampu meningkatkan efektivitas Raskin, khususnya dalam ketepatan jumlah dan harga.
2. Kinerja yang dicapai oleh sistem distribusi Raskin melalui Warung Desa lebih baik dibandingkan dengan pola distribusi yang selama ini berjalan (Pola Desa). Hal tersebut berimplikasi terhadap tanggapan yang sangat positif dari RTS dan Pemilik Warung Desa terhadap pola Warung Desa.

SARAN

- 1) Dalam pelaksanaan pola distribusi melalui Warung Desa kelembagaan RT/RW dilibatkan.
- 2) Untuk penyempurnaan konsep pola Warung Desa maka perlu dirumuskan tata-kelola system distribusi melalui Warung Desa pada level desa.
- 3) Untuk menjamin bahwa Warung Desa dapat memberikan kinerja terbaiknya dalam pendistribusian Raskin maka setiap tahun Warung Desa akan dievaluasi dan kaji-ulang kelayakannya sebagai rekanan dalam menyalurkan Raskin.
- 4) Pelaksanaan pendistribusian yang baik oleh pihak Warung Desa harus diimbangi dengan insentif yang memadai. Oleh karena itu, seberapa besar tingkat *fee* yang layak bagi Warung Desa perlu diformulasikan secara tepat.

- 5) Untuk menjamin bahwa pelaksanaan system distribusi melalui Warung Desa berjalan sebagaimana mestinya maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Oleh karena itu, perlu dianggarkan biaya monitoring dan evaluasi pada level desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2004. *Statistik Indonesia Tahun 2003*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2005. *Statistik Indonesia Tahun 2004*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2004. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002: Buku II Kabupaten*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2005. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003: Buku II Kabupaten*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2006. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2004: Buku II Kabupaten*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, 2003. *Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2003*, Bandung.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, 2005. *Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2004/2005*, Bandung.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, 2006. *Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2005*, Bandung.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, 2006. *PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2003-2005*, Bandung.
- Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog, 2005. *Pedoman Umum Program Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2005*. Jakarta.

Departement Dalam Negeri RI dan Perum Bulog, 2006. *Program Raskin 2006: Raskin, Hak Rumahtangga Miskin Menuju Sejahtera*, Jakarta

Sawit, Husein, 2002. RASKIN: Sebuah Program Perlindungan Sosial, *Majalah Pangan*, No. 38/XI/Jan/2002.

Tabor, Steven R. Dan M. H. Sawit, 2001. Social protection via Rice: the OPK Program. *The Developing Economies*, Vol. XXXIX, No. 3: 267-94.

Tabor, Steven R. dan M. H. Sawit, 2005. *RASKIN: A Macro-program Assessment*, BULOG, Jakarta.

Tim Raskin Provinsi Jawa Barat. 2005. *Program Raskin Tahun 2005 Provinsi Jawa Barat*, Bandung.

Todaro, M., 2000. *Economic Development*, 7th edition, Pearson Education Limited.